



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NOMOR: 42/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 495/PP.01.2-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 37.1/PP.04.2-BA/1410/KPU-Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR: 42/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, SERTA  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI TAHUN 2020;

## **PEDOMAN TEKNIS**

### **TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara *Adhoc*;
2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Adhoc* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

#### **B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk

mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa;
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;

17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan; dan
18. Hari adalah hari kalender.

**C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan harus berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efesiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

**BAB II**  
**TATA KERJA PENYELENGGARA**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

**A. KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan meranti dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, meliputi :

1. Merencanakan program anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman kepada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dengan berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti apabila diperlukan;

4. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati apabila diperlukan;
5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada peraturan KPU;
6. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS;
10. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Riau;
11. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Riau dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

**B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. Membantu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - n. Menyampaikan laporan berkala mingguan dan bulanan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai tahapan;
  - o. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
  - p. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Tugas Ketua PPK meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;

- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
  - j. Berkewajiban memberikan informasi kepada forum warga yaitu sistem pemilihan dan sistem demokrasi.
3. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.
- C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
    - a. Membantu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan dan DPT;

- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal pengitungan suara;
  - v. Menyampaikan laporan berkala mingguan dan bulanan kepada PPK sesuai tahapan;
  - w. Berkewajiban memberikan informasi kepada forum warga yaitu sistem pemilihan dan sistem demokrasi; dan
  - x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan atau PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas ketua PPS meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani DPS dan DPS Hasil Perbaikan;
  - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan;
  - g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. Membantu ketua PPS dalam melakukan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
- D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. Mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK dan PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Mengumuman tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapatkan pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
  - f. Dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
5. Tugas anggota KPPS adalah :
  - a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS**

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau DKPP; dan
  - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
  - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama secara berturut-turut. Periodesasi sebagaimana dimaksud adalah:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga 2008;
  - b. Periode kedua dimulai 2009 hingga 2013; dan
  - c. Periode ketiga dimulai tahun 2014 hingga tahun 2018.
  - d. Periode keempat 2019.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Dalam rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS perlu memperhatikan kecakapan dalam bidang administrasi dan teknologi informasi.
7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku.
  - c. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang dalam menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
  - d. surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e. Surat rekomendasi dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
  - f. surat pernyataan yang bersangkutan :

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 6) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - 7) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - 9) Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan.
  - 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- yang bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- g. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

## **BAB IV**

### **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

#### **A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

#### B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
  - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
  - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima pendaftaran calon anggota PPK mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2020.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon anggota PPK.
8. Dalam melaksanakan pembentukan PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membagi daerah perekrutan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :
  - a. Zona 1  
terdiri dari Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir menggunakan map berwarna merah dengan lokasi ujian di Kecamatan Tebing Tinggi;
  - b. Zona 2  
terdiri dari Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu menggunakan map berwarna Biru dengan lokasi ujian di Kecamatan Merbau;
  - c. Zona 3  
terdiri dari Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Kecamatan Rangsang menggunakan map berwarna Kuning dengan lokasi ujian di Kecamatan Rangsang.
9. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
11. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.

12. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai zona yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
14. Materi seleksi tertulis, meliputi :
  - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - b. Pengetahuan kewilayahan.
15. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan materi seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan materi tertulis dan wawancara.
17. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
19. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
20. Materi seleksi wawancara meliputi :
  - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
  - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
21. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
22. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara, sekaligus menerima tanggapan masyarakat.
23. Klasifikasi terhadap hasil tanggapan masyarakat mengenai calon anggota PPK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

24. Pengumuman pasca hasil seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK.
25. Penetapan dan Pelantikan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

**C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesempatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir; dan
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB V**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan/desa, dibentuk PPS.
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di kelurahan/Desa.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

**B. PEMBENTUKAN PPS**

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih Calon anggota PPS KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan tahapan kegiatan meiputi:
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPS;
  - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
  - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi anggota PPS;
4. Dalam mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik.
5. Dalam menerima calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
  - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Setelah melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik.

7. Calon anggota PPS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, selanjutnya melaksanakan tes tertulis.
8. Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8, berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
10. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis, dan mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
11. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan tes wawancara calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 11 meliputi:
  - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
  - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPS;
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
13. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 12, serta diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah wawancara.

#### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

#### **B. PEMBENTUKAN KPPS**

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB VII**

### **KESEKRETARIATAN**

#### **A. SEKRETARIAT PPK**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani; dan
  - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) independen dan tidak berpihak; dan
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

**B. SEKRETARIAT PPS**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti meminta kepada Lurah/Kepala Desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi :
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
  11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
  12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
  13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

## **BAB VIII**

### **PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

#### **A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah :
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui PPK dan PPS;
  - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
  - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.
  2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
  3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada PPK.
  4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
  5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
  6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
  7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan Keputusan PPS.

## **BAB IX**

### **PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS**

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau

- d. diberhentikan sementara;
2. Anggota PPK diberhentikan apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a. menerima laporan;
  - b. meneliti materi laporan;
  - c. melakukan klarifikasi; dan
  - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat:
  - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

- d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 9, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada penyelenggaraan Pemilihan dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat diatasnya.
3. bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR: 42/PP.04.2-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SERTA  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS di Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
2. Surat Pernyataan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Kasubbag Hukum,



ttd.

ABU HAMID

M. Arif Almanar

**SURAT PENDAFTARAN**

**SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir / Usia : ..... / ..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.

....., ..... 2020

PENDAFTAR,

Materai

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ..... / ..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS \*) ..... Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan.
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Kepulauan Meranti.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan

(.....)